

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan adalah konstitusional. Maka dampak ini penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa serta mengurangi potensi kekuasaan absolut dengan memastikan kekuasaan tidak terlalu lama berada di tangan satu orang. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 ini membantu mempertahankan prinsip demokrasi yang berfokus pada pengurangan kekuasaan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Serta dampak dari putusan ini terkait dengan periodisasi masa jabatan bahwa keberlakuan pembatasan masa jabatan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh kepala desa, serta menciptakan tatanan pemerintahan desa yang lebih teratur dan terkendali.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah bahwa Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 ini. Hal

ini penting untuk memastikan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 . Serta diperlukan peningkatan pengawasan oleh Bupati/Walikota dalam memberdayakan aparat pengawas fungsional di daerah dan melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Serta sekaligus juga berperan dalam meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh kepala desa serta memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan teratur dan terkendali. Dengan menerapkan saran-saran tersebut diharapkan bahwa implementasi pembatasan masa jabatan kepala desa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dapat memberikan dampak yang positif dalam menciptakan tatanan pemerintahan desa yang lebih baik dan terkendali serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Airlangga S P, 2019, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Cepalo.
- Asshiddiqie dan Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura utama, Sukabumi.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindi Media Pustaka, Surabaya.
- Hasani, Ismail, dkk, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara Bendungan Hilir
- Indra Muchlis Adnan, 2019, *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia (edisi revisi)*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- Ismail Suardi Wekkec, dkk, 2019, *METODE PENELITIAN EKONOMI SYARIAH*, CV. Adi Karya Mandiri, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit BIP, Jakarta
- Joko Purnomo, 2016, *Buku Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest Yogyakarta, Yogyakarta,
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press
- Murtir Jeddawi, 2009, *Pro-Kontra Pemekaran Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Pambudhi, H. D. 2023, *Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme*. Wijaya Putra Law Review
- R Bintarto, 2010, *Desa Kota*, Bandung.
- Rauf Rahyunir, dkk, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Surbakti, R. 1998, *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Airlangga
- Syahda Guruh Langkah Samudra, 2000, *Menimbang Otonomi VS Federal; Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-

### **Jurnal**

Hulain, Markoni, Achmad Edi Subiyanto, Joko Widarto, 2023, "Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional" *Journal on Education Volume 05* Nomor 04, Mei-Agustus 2023, Universitas Esa Unggul, Jakarta.

I Gusti Ketut Ariawan, 2013, Metode Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Hukum Vol. 1* No.1, Kertha Widya.

Kanzul Fikri dan Bakti 2021, *EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DESA DI KOTA BATU*, Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Luthfy, R. M. 2019, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Thaib, D. 2003, Menuju Parlemen Bikameral, *Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 10* (No. 23), Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945

Retno Saraswati, 2014, "Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mengsejahterakan Rakyatnya", *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14* No. 2 Edisi Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum Indonesia

### **Internet**

Afif Habibi, 2014, "Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Fakultas Hukum, Universita Jember, [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61084/Afif%20Habibi%20%20090710101333\\_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61084/Afif%20Habibi%20%20090710101333_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y) diakses Sabtu, 4 November 2023 Pukul 17.20 WIB.

Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "Bukan Soal Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji UU Desa" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18157&menu=2> diakses pada Senin 3 Maret 2023 Pukul 16.24 WIB.

Hildayanti, 2018, Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Jawa

- Tengah), <http://repository.uinbanten.ac.id/2509/> diakses Sabtu, 4 November 2023 Pukul 16.30 WIB.
- Kompas.com News, Nasional Demokrasi Pancasila: Pengertian, Aspek, Ciri, dan Prinsip, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip>. diakses pada Selasa, 14 November 2023, Pukul 16.45 Wib.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Konstitusi dalam Negara Demokratis, <https://www.mkri.id/index.php?id=11271&page=web.Berita> diakses Rabu, 8 November 2023 Pukul 18.15 WIB.
- Media Dayak, 2019, Hubungan Konstitusi, Hukum. HAM. Demokrasi, <https://mediadayak.id/hubungan-konstitusi-hukum-ham-demokrasi/> diakses Rabu, 8 November 2023 Pukul 18.10 WIB.
- Mei Suryani, 2019, S “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, <http://repository.radenintan.ac.id/6469/1/SKRIPSI%20MEI%20SURYANI.pdf> diakses Sabtu, 4 November 2023 Pukul 17.00 WIB.
- Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Mengabulkan Sebagian Uji Aturan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2> diakses Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 20.40 WIB.
- Tbnewstribata, Ini Contoh Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, 2021, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/06/20/ini-contoh-pelanggaran-pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-2/> diakses pada Selasa, 14 November 2023, Pukul 16.35 Wib.
- Website Pemerintahan Kabupaten Grobogan, Pilkadaes dan Pembelajaran Website Pemerintahan Kabupaten Grobogan, Pilkadaes dan Pembelajaran Politik, <https://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik> diakses Rabu. 15 November 2023 Pukul 20.00 Wib.
- Website Universitas Islam An Nur Lampung, 2023, Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara <https://an-nur.ac.id/blog/demokrasi-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara.htm> diakses pada Rabu, 15 Nov 2023 Pukul 20.18 Wib.
- Website Kompas.com "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi", <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>, diakses pada Kamis 4 Juli 2024 Pukul 21.14 Wib